

TEMPO DALAM KASUS KORUPSI M NAZARUDDIN

Victor A Simanjuntak
Victorsim81@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how three newspapers that have different political and ownership orientations in viewing corruption cases conducted by the Democratic Party administrator Nazaruddin Syamsuddin. The *Jurnal Nasional* newspaper is owned by the Democratic Party, *Suara Karya* is owned by Golkar Party and *Koran Tempo* which has no affiliation to certain political party but founded by political activist. Based on framing Robert Entman, this study concludes that the *Jurnal Nasional* in the framing of the news shows corruption case Nazaruddin Syamsuddin to be a personal fault and has nothing to do with the Democratic Party as the ruling party, while *Suara Karya* framing that Democrats violate the campaign pledge as a committed party to combat corruption. News framing *Koran Tempo* encourages the Corruption Eradication Commission to dare to reveal corruption cases despite the involvement of elites and ruling party officials.

Keyword: Framing, Corruption, Newspaper, Parti

ABSTRAK

Tulisan penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana tiga surat kabar yang memiliki orientasi politik dan kepemilikan yang berbeda dalam melihat kasus korupsi yang dilakukan pengurus Partai Demokrat Nazaruddin Syamsuddin. Surat kabar *Jurnal Nasional* dimiliki Partai Demokrat, *Suara Karya* dipunyai Partai Golkar dan *Koran Tempo* yang tidak punya afiliasi terhadap partai politik tertentu namun didirikan oleh aktivitis politik. Berdasarkan framing Robert Entman, penelitian ini menyimpulkan *Jurnal Nasional* dalam framing beritanya menunjukkan kasus korupsi Nazaruddin Syamsuddin menjadi kesalahan oknum/pribadi dan tidak ada

kaitan dengan Partai Demokrat sebagai partai penguasa, sementara *Suara Karya* melakukan framing bahwa

Partai Demokrat melanggar janji kampanye sebagai partai yang berkomitmen memberantas korupsi. Framing berita *Koran Tempo*

mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berani mengungkap kasus korupsi meskipun ada keterlibatan elite dan pengurus partai yang berkuasa.

Kata kunci: Framing, Korupsi, Surat kabar, Partai

Pendahuluan

Kebebasan media massa yang kini dinikmati media massa Indonesia sangat diperlukan dalam mengawal pemerintah yang berkuasa, khususnya dalam mengawasi jalannya pemerintah agar tidak terjebak dalam praktik korupsi. Media massa Indonesia memainkan peranan penting untuk membantu pembasmian praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan para usahawan yang menjadi anggota Parlemen (Muladi 2000: 12).

Namun, rendahnya kualitas media massa Indonesia di masa reformasi dan kebebasan media massa menyulitkan media massa Indonesia melakukan

perang terhadap korupsi. Dalam keadaan ini, media massa Indonesia tidak bisa menjalankan kewajiban kewartawanan seperti yang

disampaikan Laswell dan Wright untuk melakukan fungsi pengawasan sosial (McQuail 1987: 56).

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International (TI) pada tahun 2011, Indonesia berada di kedudukan keempat dari 10 negara Asia Tenggara yang paling korupsi. Sebagai perbandingan, Brunei Darussalam 5.5, Malaysia 4.4 dan Thailand 3.5 manakala Indonesia mempunyai nilai IPK 9.8 (Hendardi 2011: 452).

Sebelum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden pada Pemilu Presiden pada tahun 2004, parlemen dan pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikut Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas KPK adalah untuk membantu penguatkuasaan undang-undang rasmi seperti polisi dan jaksa dalam melakukan pembasmian praktik korupsi serta melakukan pencegahan jenayah korupsi.

Karena itu, rakyat Indonesia sangat menyokong tema janji pembasmian korupsi yang disampaikan SBY pada

kampanye Pemilu Presiden pada tahun 2004 dan Pemilu Presiden 2009. Sebagai calon presiden, SBY berjanji akan memimpin langsung pembasmian korupsi. Dalam setiap kampanyenya, SBY juga berjanji akan bertindak tegas kepada sesiapaun yang melakukan korupsi.

Partai Demokrat yang didirikan SBY - juga menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dalam setiap kampanye, selalu menyeru anti-korupsi dan tema kampanye pada Pemilu Presiden 2009 ialah 'Katakan Tidak Pada Korupsi'.

Janji kampanye SBY dan Partai Demokrat untuk membasmi korupsi dan menghukum tegas siapa saja - terutama pejabat pemerintah dan usahawan - yang melakukan korupsi telah membawa harapan besar masyarakat (pemilih) kepada SBY.

Dalam Pemilu Presiden 2009, SBY terpilih kembali sebagai presiden untuk kali kedua (*second term*). SBY

mendapat undi majoriti dan signifikan dari rakyat Indonesia yang mahukan pemimpin yang berani bersikap konkrit

menghapuskan korupsi sekaligus menghukum pelaku korupsi. Komitmen Presiden SBY untuk membasmi praktik korupsi dan janji tidak akan melindungi siapapun yang melakukan korupsi diuji dalam kasus penangkapan Bendahari Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin oleh KPK.

Nazaruddin ditangkap karena dianggap menjadi dalang kasus korupsi yang dianggarkan merugikan keuangan negara Indonesia sebanyak RM3 billion (Rp 9 trilion). Nazaruddin yang juga usahawan dan menjadi anggota Parlemen dari Partai Demokrat berusaha menetapkan projek pembangunan yang berasal dari dana keuangan negara.

Bersama beberapa anggota Parlemen dari Partai Demokrat seperti Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum (yang juga Pengurus Partai Demokrat), mereka didakwa berupaya agar projek-projek pembangunan seperti projek pembangunan wisma Atlet di Palembang untuk Sukan ASEAN dan proyek pembangunan rusmah sakit pendidikan, dilakukan oleh perusahaan tertentu.

Sebagian besar saham perusahaan tertentu seperti PT Anugerah yang

mengerjakan proyek-projek tersebut dimiliki Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum. Pengakuan ini pernah disampaikan Nazaruddin dalam wawancaranya dengan stasiun televisi *Metro TV*, pada 19 Juli 2011.

Dana pembangunan proyek itu dinaikkan nilai pembangunannya (*mark up*) sehingga perusahaan itu mempunyai kelebihan dana yang besar. Dana perusahaan yang dikorupsi itu kemudian dibagikan kepada Menteri Pemuda Sukan Andi Mallarangeng yang juga salah satu pendiri Partai Demokrat dan orang kepercayaan SBY dan anggota Partai Demokrat.

Dengan demikian, kasus korupsi ini dipercayai tidak hanya melibatkan Muhammad Nazaruddin tapi juga Pengurus Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Bhaskoro Yudhoyono (atau biasa dipanggil Ibas) yaitu anak Presiden SBY. Selain itu, kasus korupsi ini juga melibatkan beberapa anggota Partai Demokrat yang lain.

Nazaruddin juga mengaku dana korupsi ini digunakannya untuk membiayai

Partai Demokrat dalam menjalankan kegiatan partai. Banyak program dan aktiviti Partai Demokrat termasuk dalam usaha untuk menarik simpati masyarakat dan menaikkan popularitas Partai Demokrat dan SBY dibiayai oleh uang hasil korupsi yang dilakukan Muhammad Nazaruddin.

Bukan saja kepada Partai Demokrat, dana hasil korupsi itu juga diberikan kepada sejumlah anggota Parlemen terutama yang duduk di Badan Anggaran DPR yakni sebuah badan yang bertugas memilih dan menentukan projek-projek pembangunan yang dibiayai uang pemerintah.

Peranan media massa seperti media massa *Suara Karya*, *Jurnal Nasional* dan *Koran Tempo* dalam melaporkan kasus korupsi dalam masa pemerintah Presiden SBY diperlukan untuk membantu dalam pembasmian praktik korupsi. Namun, peranan media massa seperti media massa dalam membantu pembasmian korupsi sering terhalang karena media massa mempunyai kepentingan tertentu seperti adanya kepentingan politik pemilik media massa itu sendiri (Effendy 2000: 16).

Media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* mempunyai kepentingan politik masing-masing yaitu sebagai media massa partai. *Suara Karya* dimiliki oleh Partai Golkar (Partai Golkar kalah dalam Pemilu Parlemen 2009 dan Pemilu Parlemen 2014) dan *Jurnal Nasional* didirikan oleh pemimpin Partai Demokrat (Partai Demokrat yang memenangi Pemilu Parlemen 2009). Sementara *Koran Tempo* dimiliki oleh kalangan individu yang tidak berorientasi pada mana-mana partai politik di Indonesia.

Media massa bisa mempengaruhi dan membentuk persepsi terhadap pembaca, yaitu dari suka menjadi tidak menyukai ataupun dari tidak mengenal, menjadi mengagumi dan pada akhirnya pembaca bisa membentuk fikiran tentang isu yang berlaku melalui informasi yang dipaparkan dalam media massa tersebut (McComb & Shaw 1997: 18).

Kajian ini akan menyelidik pemaparan berita-berita tersebut dalam media massa-media massa yang dipunyai partai politik pemerintah, oposisi dan yang tidak dimiliki pemerintah dan oposisi (independen).

Penelitian ini berdasarkan fungsi dan peranan media massa yang seharusnya menyebarkan informasi berupa berita yang bisa dipercayai oleh pembaca. Media massa harus menyediakan informasi yang seimbang dan seneutral mungkin. Media massa harus bertindak sebagai mata dan telinga rakyat, melaporkan peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka (Cohen 2005: 7).

Perbedaan pemberitaan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin di media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* menarik untuk diteliti untuk memahami bagaimana pemberitaan kedua media massa yang dimiliki partai pembangkang dan partai pemerintah itu bergelut dengan fungsi media massa sebagai media yang mesti mengandungi informasi yang neutral dan tidak berpihak kepada khalayak pembaca.

Media massa yang dimiliki partai pembangkang dan partai pemerintah tidak bisa membuat media massa itu mengandungi informasi yang mengiringi pendapat pembaca sesuai keinginan pemilik media massa tersebut. Media massa seharusnya menyediakan informasi yang tak memihak sehingga pembaca punya

pengetahuan yang sebenarnya tentang masalah tersebut. Hubungan antara media dan masyarakat akan melahirkan kebergantungan, namun tidak bisa diabaikan bahwa media bersifat bebas dan harus melakukan fungsinya dalam persekitaran kompetensi profesional. Media seharusnya mengembangkan sikap objektif, terbuka, berkecuali, dan mengimbangkan sehingga mencipta jarak dari kekuasaan tanpa menimbulkan konflik (McQuail 1987: 276).

Cara pemberitaan media massa termasuk *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* seharusnya tidak bisa melanggar unsur-unsur objektif dan berkecuali dalam pemberitaan media seperti disampaikan J Westerthal (McQuail 1994) yakni kebenaran, relevan, seimbang, neutral, berinformasi, objektif, berfakta, dan ketidakberpihakan.

Penelitian ini ingin mengkaji pola pemberitaan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin di tiga media massa yakni *Suara Karya*, *Jurnal Nasional* dan *Koran Tempo* dalam konteks pemilikan

media massa dan peranan media massa dalam masyarakat. Kajian pemberitaan di tiga media massa itu berdasarkan kepentingan tiga komponen yang satu sama lain saling mengimbangi yakni peranan media massa dalam masyarakat, kepentingan pembaca dan kepentingan pemilik media massa.

Konstruksi Realitas

Dalam pandangan konstruksionis, berita bukan cermin dan refleksi, tetapi pembinaan suatu realiti. Ketika suatu peristiwa menjadi sebuah berita yang dipaparkan dalam media, maka berita tersebut adalah hasil dari pembinaan sosial yang selalu mengandung pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita bergantung pada bagaimana fakta itu difahami dan dimaknai dalam laporan media massa (Schudson, dalam Curran dan Gurevitch 1991: 141-142).

Media bukanlah sekadar saluran yang bebas atau neutral yang menyajikan berita apa adanya atau cermin dari realiti. Ia adalah subjek yang mengkonstruksi realiti, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya (rujukan). Di sini, media dianggap

sebagai agen pembinaan sosial yang secara aktif mendefinisikan realiti untuk disajikan kepada khalayak (Bennet 1982: 287). Sebagai agen pembinaan realiti, media memilih realiti mana yang diambil dan mana yang tidak diambil untuk disajikan dalam berita. Media juga memilih pelakon-pelakon yang dijadikan sumber berita yang tampil dalam pemberitaan. Melalui penggunaan bahasa, media juga berperanan dalam mendefinisikan pelaku dan peristiwa (Eriyanto

2002; 287). Pendekatan konstruksionis melihat wartawan bukanlah pelapor tetapi agen pembinaan realiti.

Seperti dinyatakan Ghanem (1997), bila membicarakan pengkerangkaan, kita sebenarnya membincangkan soal penentuan agenda karena konsep pengkerangkaan sebagai pencabangan dari teori penentuan agenda. Menurut Ghanem (1997), pengkerangkaan ialah penentuan agenda tahap kedua (*second-level of agenda setting*) karena pada teori penentuan agenda menilai bahwa pembisa ubah tidak bersandar (*independent variable*) adalah isu atau topik semasa yang terus menerus disiarkan dalam berita.

Pengkerangkaan lebih tertumpu pada fakta-fakta atau bukti-bukti isu semasa yang digunapakai dalam berita.

Model penentuan agenda mengandaikan adanya hubungan positif antara kadar yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang masyarakat berikan pada persoalan itu. Ringkasnya, apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat dan apa yang dilupakan media akan luput juga dari perhatian masyarakat (Rakhmat 1995: 68).

Analisis Wacana

Wacana atau *discourse*, berarti objek atau idea yang diperbincangkan secara terbuka di depan publik sehingga menimbulkan perbincangan yang tersebar luas. Dalam konteks penggunaan, wacana menyiratkan adanya kuasa (power) yang berlaku dalam satu sistem seperti wacana kapitalisme, liberalisme, sosialisme dan sebagainya (Pohan, 2009 :17)

Analisis wacana merupakan studi mengenai struktur pesan dalam fenomena komunikasi yang memusatkan perhatian bukan kepada aspek gramatikal, ayat, dan kata dalam teks tetapi struktur pesan yang lebih

kompleks (Littlejohn, 2001:84). Analisis wacana berhubungan dengan bagaimana cara teks disusun untuk memahami pesan (message), dilihat sebagai aksi untuk melakukan suatu ungkapan kata-kata (teks) dan usaha bagi pencapaian prinsip yang digunakan komunikator

Dalam penelitian ini, penyelidik akan menggunakan kaedah yang dimodifikasi dari kaedah yang dibuat oleh Norman Fairclough yaitu *Sociocultural Approach Change* (Norman Fairclough dalam Erianto, 2001: 390). Kaedah ini mengandaikan bahwa wacana sebagai amalan sosial ada hubungkait antara amalan diskursif dengan identiti dan hubungan sosial. Serta kaitan antara teks dan amalan sosial dihubungkan oleh amalan kewacanaan.

Dalam kaedah yang dibuat Norman Fairclough, diperlukan tiga paras untuk menganalisis teks berita yaitu analisis teks (*text analysis*), analisis wacana (*discourse analysis*) dan amalan sosiobudaya (Norman Fairclough dalam

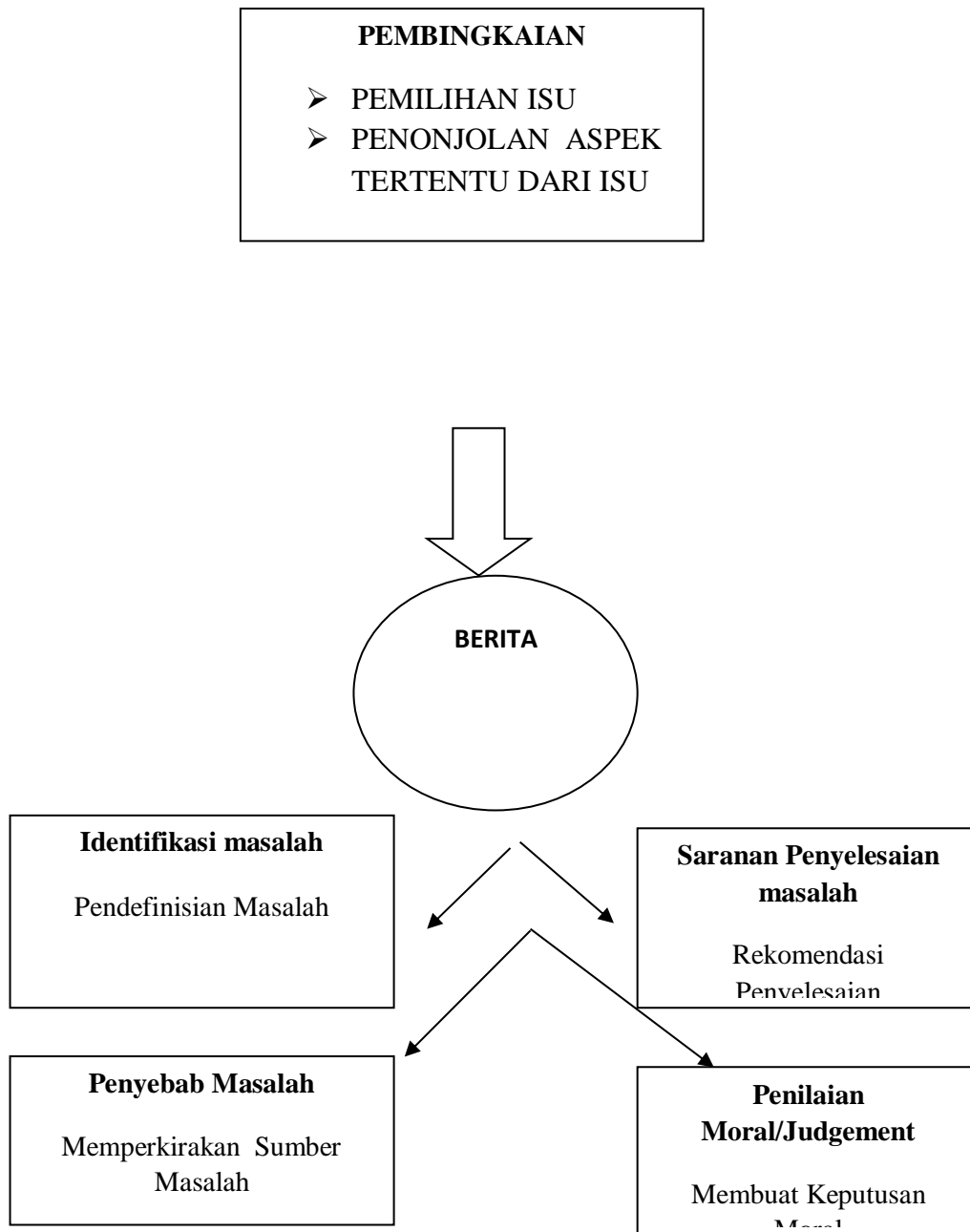
Marianne W Jorgensen dan Louise J Philips 2007: 26 -129).

Fairclough menempatkan praktik wacana sebagai sarana untuk menghasilkan konsumsi dan interpretasi teks (newsroom management). Cara ini diperoleh pengkaji dengan berusaha melalui temubual dengan pengurus ketiga media massa. Dari hasil analisis isi dan analisis pbingkaian, pengkaji akan menggunakannya untuk temubual pengarang berita bagaimana mereka memproduksi teks-teks di ketiga-tiga media massa. Contohnya, apa yang menjadi pertimbangan serta faktor-faktor dalam membuat tajuk berita terkait kasus korupsi Muhammad Nazaruddin, bagaimana menugaskan pencarian dan penulisan berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin serta bagaimana memilih lead atau perenggang pertama berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin dalam berita.

Praktik Sosial. Tahapan ini menghubungkan antara teks dan pembuat teks. Fairclough menyatakan teks yang dihasilkan suatu media ialah cerminan sistem sosial budaya yang wujud. Wartawan dalam mengkonstruksi suatu realiti sangat dipengaruhi sistem sosial budayanya.

Rajah 3.1

Skema Konsep Pembingkaian



(Sumber: Adaptasi Entman, 1993)

Framing Media Massa

Dari hasil penelitian kaedah kuantitatif didapati Realiti kasus Muhammad Nazaruddin mendapat perhatian yang cukup dari tiga media massa yang dikaji yaitu *Suara Karya*, *Jurnal Nasional* dan *Koran Tempo*. Hal ini sejalan dengan adanya perhatian publik atau rakyat Indonesia yang besar terhadap kasus korupsi Muhammad Nazaruddin yang disyaki melibatkan SBY dan anggota-anggota Partai Demokrat.

Namun, media massa *Suara Karya* memiliki perhatian yang lebih lagi dengan lebih banyak menempatkan berita-berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin di halaman muka. Hal ini berbeda dengan *Jurnal Nasional* yang lebih banyak menempatkan di halaman dalam. Sebagai media massa yang dimiliki Partai Demokrat, *Jurnal Nasional* memberitakan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin sebagai berita biasa dan bukan berita istimewa sehingga tidak selalu harus disajikan di halaman muka.

Sementara media massa *Koran Tempo*, karena format halaman yang membatasi berita di halaman satu, lebih menekankan pada kedalaman dan kelengkapan isi berita. Untuk itu, *Koran Tempo* sering membuat berita investigasi dengan mengirimkan

wartawannya mewawancarai narasumber yang penting di lapangan. Hal ini berbeda dengan *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* yang beritanya lebih banyak menyajikan kenyataan dari anggota-anggota partai dan anggota-anggota parlemen.

Dalam pemberitaannya tiga media massa yang dikaji memberitakan image Muhammad Nazarudin secara berbeda. Media massa *Suara Karya* memberitakan Muhammad Nazaruddin bisa menjadi wira dalam amalan pembasmian korupsi karena Nazaruddin mengungkapkan informasi-informasi penting tentang sesiapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi.

Sementara *Jurnal Nasional* membuat citra atau image Nazaruddin sebagai pembohong yang kenyataannya tidak bisa dipercayai. Sedangkan *Koran Tempo* memberitakan image Nazaruddin sebagai tokoh penting yang harus dilindungi karena Nazaruddin memiliki bukti keterlibatan anggota-anggota Partai Demokrat terlibat korupsi.

Dalam pemberitaannya, *Suara Karya* mengkerangkan image SBY sebagai presiden dan penubuh serta pemimpin Partai Demokrat yang penakut, tidak

tegas dan melindungi Muhammad Nazaruddin dan anggota-anggota Partai Demokrat lainnya yang terlibat korupsi. Sementara *Jurnal Nasional* mengkerangkakan image SBY sebagai pemimpin yang tidak mau mencampuri urusan hukum. *Koran Tempo* mencitrakan SBY sebagai pemimpin yang tidak berani dan tidak tegas dalam menindak anggota-anggota Partai Demokrat. Karena tidak tegas, *Koran Tempo* menjangka Partai Demokrat bisa kalah dalam Pemilihan Raya 2014.

Pola framing yang digunakan dalam kasus korupsi Muhammad Nazaruddin berbeda-beza setiap media massa. Media massa *Suara Karya* melihat kasus korupsi Muhammad Nazaruddin sebagai kasus korupsi yang harus dibasmi oleh KPK dan SBY serta Partai Demokrat jangan melindungi Nazaruddin. *Jurnal Nasional* melakukan framing kasus korupsi Nazaruddin adalah tanggung jawab peribadi dan bukan tanggung jawab SBY dan Partai Demokrat. *Koran Tempo* dalam menyajikan beritanya menganggap kasus korupsi Muhammad Nazaruddin adalah kasus korupsi biasa yang harus dibasmi dan memberitakannya tanpa ada kepentingan Nazaruddin sebagai anggota Partai Demokrat.

Berdasarkan hasil kajian ini didapati bahwa faktor kepemilikan berpengaruh dalam pemberitaan kasus korupsi di tiga media massa yang diselidiki. *Suara Karya* sebagai media massa yang didirikan dan dimiliki Partai Golkar menggunakan berita-berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin untuk menciptakan image yang negatif terhadap SBY dan Partai Demokrat. Kepentingan untuk memenangi Pemilu 2014, membuat *Suara Karya* menjadi tidak berimbang dan objektif dalam menyajikan berita-berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin.

Begitu juga, media massa *Jurnal Nasional* yang didirikan oleh anggota-anggota Partai Demokrat berusaha membela SBY dan Partai Demokrat. Sebagai media massa yang menyuarakan kepentingan dan aspirasi Partai Demokrat, *Jurnal Nasional* mengutip kenyataan punca berita yang menguntungkan Partai Demokrat. Karena itu, aspek keuangan dan ekonomi menjadi dilupakan media massa *Jurnal Nasional* sehingga selesai Pemilu 2014, *Jurnal Nasional* tidak terbit lagi.

Sebagai media massa yang tidak dimiliki anggota-anggota partai politik tapi oleh budayawan dan aktivis anti-korupsi, *Koran Tempo* memuat berita

kasus korupsi Muhammad Nazaruddin sebagai realiti kasus korupsi yang harus dibasmi KPK. *Koran Tempo* melalui beritanya mendorong KPK untuk berani menangkap Nazaruddin dan sesiapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi termasuk anggota-anggota Partai Demokrat sebagai partai penguasa. *Koran Tempo* dalam beritanya tidak melihat kepentingan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin untuk Pemilu 2014. Namun, *Koran Tempo* menjangka bila SBY tak tegas, Partai Demokrat bisa kalah dalam Pemilu 2014.

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dibahas pada kasusimpulan, ditemukan beberapa implikasi teoritical yaitu:

Pertama, pengkerangkaan atau framing yang digunakan oleh tiga media massa yang dikaji yaitu *Suara Karya*, *Jurnal Nasional* dan *Koran Tempo* dalam menyajikan realitas politik berupa berita-berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin) memiliki perbedaan utamanya dari segi kepemilikan, ideologi dan situasi politik yang berada di luar media yang mempengaruhi konstruksi berita.

Media massa *Suara Karya* yang dimiliki Partai Golkar mengkerangkakan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin sebagai tanggung jawab Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai penubuh dan pemimpin/elit Partai Demokrat. Sementara media massa *Jurnal Nasional* yang didirikan oleh elit-elit dan penubuh Partai Demokrat memandang masalah kasus korupsi Muhammad Nazaruddin adalah tanggungjawab peribadi Muhammad Nazaruddin dan tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat dan SBY.

Sedangkan media massa *Koran Tempo* dalam beritanya mengkerangkan bahwa sesiapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini harus bertanggungjawab di hadapan mahkamah. *Koran Tempo* juga mengkerangkan dalam berita-beritanya bahwa SBY sebagai presiden dan Partai Demokrat sebagai partai penguasa, tidak bisa melindungi anggota-anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi.

Perbedaan pengkerangkaan dari tiga media massa yang dikaji ini dalam menyajikan berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin menunjukkan adanya proses konstruksi sosial atas realitas politik yang diberitakan sesuai dengan kepentingan dan kepemilikan

media massa tersebut. Hal ini sejalan dengan dengan temuan hasil penelitian dalam bidang komunikasi massa yang mengatakan “news is socially created product, not a reflection of an objective reality (Shoemaker dan Reese, 1996 :21).

Artinya, konsep berita sebagai produk yang diproduksi atau dikonstruksi secara sosial menunjukkan adanya sejumlah besar pengaruh faktor-faktor ekonomi, politik, kepemilikan dan ideologi dalam proses pencarian fakta sosial, penentuan sumber berita, pengumpulan, penyortiran dan penyeleksian hingga akhirnya pembuatan berita seperti yang tampil sebagai realitas simbolik media (*second hand reality*). (Yusuf Hamdan, 2006 :45)

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ibnu Hamad yang mengkaji wacana kritikal ke atas sejumlah media massa di Indonesia yang menyimpulkan bahwa perbedaan konstruksi wacana disebabkan oleh perbedaan orientasi media massa antaranya faktor ideologi, idealistik dan politik media. (Ibnu Hamad; 2004 : 57)

Media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* menggunakan ideologi sebagai media massa yang dimiliki partai untuk membela kepentingan partai dan pemimpinnya. Ideologi sebagai media massa partai ini tidak dimiliki oleh *Koran Tempo* sebagai media massa yang dimiliki kumpulan tokoh-tokoh independen yang berjuang untuk membasmi praktik korupsi demi kemajuan dan demokrasi di Indonesia.

Kedua; kepentingan ekonomi juga mendasari konstruksi pemberitaan kasus korupsi Muhammad oleh *Koran Tempo* dibanding media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional*. Dalam pengkerangkaannya, *Koran Tempo* tidak hanya menekankan unsur idealistik dari penubuhnya. Sebagai media massa yang sepenuhnya tergantung kepada iklan dan edaran media massa sebagai penopang ekonomi dan keuangan perusahaan, *Koran Tempo* menyajikan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin berdasarkan minat dan daya tarik dari pembacanya. Kebutuhan pembaca terhadap informasi yang kredibel, mendalam dan lengkap dari media massa *Koran Tempo* dari kasus korupsi Muhammad Nazaruddin dipenuhi dengan menyajikan berita-berita yang bersifat investigatif atau berita penelitian.

Hal ini berbeda dengan media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* yang menampilkan berita kasus korupsi Muhammad Nazaruddin berdasarkan kepentingan ideologi partai untuk memenangkan Partai Golkar dan Partai Demokrat pada Pemilu Parlemen 2014 dan Pemilu Presiden 2014. Karena itu, penelitian ini mendapati dalam pemberitaannya media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* lebih banyak mengandalkan berita-berita *straight news* daripada berita investigatif (*investigative report*) atau berita analisis (*analysis news*)

Didapati pula dari penelitian ini, sumber berita utama dari media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* adalah anggota-anggota dan pemimpin partai yang membela kepentingan partai masing-masing. Sehingga tampak ada pemihakan dari kedua media massa ini terhadap kepentingan partai ketimbang kepentingan masyarakat (pembaca) Indonesia yang menginginkan partisipasi media massa dalam pembasmian praktik korupsi.

Besarnya kepentingan membela ideologi partai oleh media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* ini daripada kepentingan ekonomi membuat media massa *Jurnal Nasional* mengalami kasusulitan keuangan. Karena itu, *Jurnal Nasional* mengalami kebangkrutan dan tidak terbit lagi. Media massa *Jurnal Nasional* tidak terbit lagi tidak lama setelah Partai Demokrat kalah dalam Pemilu Parlemen 2014 dan SBY tidak lagi menjadi presiden. Sementara *Suara Karya* sebagai media massa yang harus membela Partai Golkar, sulit menjadi media massa yang kredibel dan disukai pembaca serta sulit pula masuk menjadi bagian dari media massa mainstream di Indonesia seperti media massa *Kompas* dan *Seputar Indonesia*.

Ketiga; adanya kebebasan pers di Indonesia dengan dihilangkannya izin dan tidak ada lagi kontrol maupun sensor media, maka media massa di Indonesia memiliki kebebasan untuk mengkonstruksikan realitas di media massa. Dengan kata lain, tidak ada dominasi kekuatan politik di luar institusi media massa atau media massa. Namun, dengan tidak adanya kontrol dari pemerintah dan kurangnya

tekanan kekuatan politik di luar media massa, maka media massa Indonesia akan dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal.

Media massa Indonesian akan berhadapan dengan proses liberalisasi yang mengutamakan berita-berita untuk kepentingan pemilik modal dan kepentingan iklan sehingga berita-berita yang dibutuhkan pembaca bisa saja tidak dimuat karena tidak sesuai keinginan pembaca dan kepentingan bisnis perusahaan. Kasus bangkrut dan tidak terbitnya media massa *Jurnal Nasional* yang didirikan dan dimiliki elit Partai Demokrat menjadi pelajaran bagi pers di Indonesia bahwa media massa yang ditopang oleh kekuasaan (partai) politik bisa hancur bila tidak diimbangi oleh kepentingan ekonomi (pembaca dan iklan). Semasa menjadi partai penguasa, Partai Demokrat memiliki keuangan karena didukung oleh sumber modal yang besar sehingga bisa menubuhkan media massa *Jurnal Nasional* sebagai media untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi elit dan pemimpin Partai Demokrat.

Tapi, setelah Partai Demokrat dan SBY tak lagi berkuasa, *Jurnal Nasional* tidak lagi memiliki kekuatan modal untuk terus terbit. Kepentingan untuk membela ideologi partai daripada kepentingan modal, telah membuat *Jurnal Nasional* tidak mampu menjadi media massa mainstream yang disukai dan digemari masyarakat pembaca di

Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mc Chesney yang mengatakan peningkatan sisi bisnis dan modal pers menjadi ancaman bagi masyarakat atau publik. Semakin meningkatnya peran modal dan kapital maka ruang publik akan semakin menghilang dari media massa.

Keempat, kebebasan pers di Indonesia menjadi sebuah masalah yang harus diperhatikan bersama. Pers Indonesia bebas dari tekanan penguasa atau pemerintah tapi pers harus memiliki tanggung jawab kepada pembaca. Kepentingan pemilik dan kepentingan pemodal, tidak bisa membuat media massa di Indonesia kehilangan tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan luas masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini berguna bagi pengelola media massa dalam membuat kebijakan bagi wartawan dalam memilih dan menseleksi isu atau pesan serta menuliskannya dalam bentuk berita. Khususnya bagi ketua pengarang atau pemilik media massa yang didirikan dan dimiliki partai politik seperti media massa *Suara Karya* dan *Jurnal Nasional* dalam menyajikan informasi bagi pembacanya.

Kepentingan ideologi partai yang dipegang menjadi ideologi media massa dalam mencari, menyusun, menulis dan menyajikan berita tidak bisa terlalu dipaksakan karena ada kepentingan modal (iklan) serta kepentingan kebutuhan pembaca terhadap informasi yang kredibel dan seobjektif mungkin

Metode penelitian dengan menggunakan analisis pengkerangkaan (framing) bisa menjadi jawaban untuk menyingkap bagaimana fenomena pemaknaan dan pembinaan realiti oleh media massa yang memiliki kepentingan serta ideologi. Khususnya

lagi dalam melihat bagaimana media massa di suatu pemerintah melakukan pengkerangkaan atau pembinaan realiti berdasarkan sistem politik yang berlaku. Hal ini tentu menarik untuk dikaji apabila membandingkan strategi pengkerangkaan (framing) media massa dalam sistem politik yang otoriter dengan media massa yang ada di pemerintah yang sedang mengalami transisi demokrasi yang lebih terbuka dan bebas.

Dengan demikian, kajian dengan menggunakan analisis dan metod pengkerangkaan ini mampu memberikan pelajaran, pendidikan mahupun kontribusi tertentu pada akademisi guna menambah ilmu pengetahuan tentang pengembangan penelitian dengan teori dan metod pengkerangkaan.

Hasil pengkajian secara akademis ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pembelajaran kepada wartawan dan pemilik media massa serta masyarakat pembaca untuk menyajikan berita-berita media massa yang berisikan informasi yang akurat, objektif dan terpercaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penyelidik memberikan sarana bagi peneliti yang ingin membuat penelitian lanjutan yaitu:

Pengkajian mengenai akbar yang dimiliki partai masih perlu dilanjutkan. Penelitian tentang media massa yang didirikan dan dimiliki partai politik dan bertugas untuk menyampaikan informasi dan ideologi partai kepada pembacanya masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia.

Terlebih lagi penelitian yang memfokuskan pada teks-teks berita yang tidak hanya mengenai berita

politik saja tapi juga penelitian teks-teks berita yang terkait dalam proses rekonstruksi sosial realitas di bidang (berita) ekonomi, hukum dan budaya.

Penelitian terhadap media massa di Indonesia sudah banyak dilakukan namun sangat sedikit yang memfokuskan pada media massa yang didirikan dan dimiliki partai politik. Apalagi, kebebasan pers di Indonesia diiringi juga dengan kebebasan politik sehingga sesiapa saja dengan mudah menubuhkan partai politik. Adanya kepentingan untuk menyebarluaskan program, serta visi dan misi partai membuat penubuh dan anggota-anggota serta pemimpin partai politik baru di Indonesia membutuhkan media massa sebagai saranannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1991) *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Alkotsar, Artijo. (2009) *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Vol 16. Edisi Khusus. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII
- Alreck, Pamela, L dan Robert B. Steele. (1995) *The Survey Research Handbook: Guidelines and Strategies for Conducting a Survey*. New York: Mc Graw-Hill
- Adoni, Hana and Sherril Manne. (1984) *Media and The Social Construction of Reality: Toward and Integration of Theory and Research*. *Communication Research*. Pp. 323-340
- Babbie, Earl. (2004) *The Practice of Social Research* Edisi ke-10. London: Wadsworth
- Bagdiklan, Ben H. (1992) *The Media Monopoly*. Boston: Beacon Press
- Baran, Stanley J. (2008) *Introduction Mass Communication: Media Literacy and Culture*. Toronto: Mc-Graw-Hill Higher Education
- Cangara, H. (2009) *Komunikasi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persad
- Curran, James. (2002) *Media Power*. London: Routledge
- DeFleur, Melvin & Everette E.Dennis. (1985) *Understanding Mass Communication*. Boston: Houghton Press
- Dominic, Joseph R (2002), *The Dynamic Mass Communication: Media in the Digital Age 7Th Edition*, New York, The Mc Graw-Hill Companies

